

JEJAK PEREMPUAN SOLO RAYA DI TENGAH PUSARAN COVID-19 | Setyasih Harini, S.I.P., M.Si

JEJAK PEREMPUAN SOLO RAYA DI TENGAH PUSARAN COVID-19



SETYASIH HARINI, S.I.P., M.SI

JEJAK PEREMPUAN SOLO RAYA DI TENGAH PUSARAN COVID-19

Penulis:

Setyasih Harini, S.IP., M.Si

Editor:

Hasna Wijayati, S.IP., M.A.

Penerbit



Unisri Press © 2022

Jejak Perempuan Solo Raya di Tengah Pusaran Covid-19

Penulis:
Setyasih Harini

Editor:
Hasna Wijayati

ISBN: 978-623-5859-28-6

Tata Letak: Nabila
Desain sampul: Roni Setyawan

Penerbit:
UNISRI Press

Redaksi:
Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo,
Banjarsari, Kota Surakarta
Press.unisri.ac.id
unisripress@gmail.com
Anggota APPTI

Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo
Cetakan Pertama, 2022, Oktober

Copyright © 2022

s

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Saat ini, pandemi Covid-19 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Selama Covid-19, kepala daerah menjadi ujung tombak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap daerahnya. Masih segar dalam ingatan masyarakat berapa perempuan sebagai kepala daerah yang memberikan sentuhan berbeda. Dari level global sampai lokal menunjukkan kemampuan dan sekaligus keberhasilan eksekutif perempuan memberikan warna tersendiri. Sentuhan seorang eksekutif perempuan dapat diibaratkan seorang ibu yang merawat anak.

Buku ini disajikan kepada pembaca dengan tujuan dapat mengulik kiprah eksekutif perempuan dan perjuangannya di tengah pandemi Covid-19. Untaian katanya secara runtut berbasis pada logika ilmiah menjadi bukti nyata terhadap permasalahan yang diangkat. Proses penyusunan buku ini dilakukan secara bertahap dengan menangkap fakta melalui komunikasi dua arah dengan masyarakat. Pemilihan sebagian

masyarakat untuk diwawancara didasarkan pada kapasitas maupun pengalamannya selama Covid-19.

Harapan penulis, dengan digengamnya buku ini oleh para pembaca dapat menambah wawasan keterbukaan gender. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan politik sebagai pengambil keputusan sama seperti laki-laki. Meski dalam kultur patriarki, masyarakat Jawa modern diharapkan lebih terbuka terhadap perempuan untuk berkarir dan bermanfaat bagi masyarakat.

Surakarta, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I Literasi Kesehatan Bagi Lansia di Tengah Pandemi Covid-19	1
A. Pengantar	1
B. Perempuan, Pembangunan dan Literasi	4
C. Taat Pemerintah, Siapa Takut	8
D. Daftar Pustaka	16
BAB II Instagram Sebagai Saluran Inspirasi Perempuan Selama Pandemi Covid-19	18
A. Pengantar	18
B. Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sragen Pada Tahun 2020-2021	23
C. Literasi Digital Protokol Kesehatan oleh Bupati Sragen Dalam Mengatasi Covid-19	31
D. Daftar Pustaka	39
BAB III Peran Ganda Perempuan Selama Pembelajaran Jarak Jauh	44
A. Pengantar	44

B. Pola Pengasuhan Ibu Terhadap Anak Di Tengah Pandemi COVID-19	47
C. Penutup	51
D. Daftar Pustaka	52
BAB IV Sentuhan Budaya Jawa untuk Mengatasi Covid-19	54
A. Pengantar	54
B. Gender Feminin pada Gaya Kepemimpinan Politik	62
C. Falsafah Gaya Kepemimpinan Politik dalam Konteks Budaya Jawa-Surakarta	65
D. Gaya Kepemimpinan Bupati Sragen Dalam Mengatasi Covid-19	69
E. Daftar Pustaka	77
Profil Penulis	83



BAB I

Literasi Kesehatan Bagi Lansia di Tengah Pandemi Covid-19

A. Pengantar

Perempuan dan pembangunan bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Perempuan dapat menjadi bagian dan sekaligus sebagai obyek atau sasaran dari proses pembangunan. Di sisi lain, perempuan juga menjadi subyek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut terlihat melalui program pembangunan berkelanjutan yang salah satu targetnya adalah pemberdayaan perempuan. Dalam tulisannya Claudia Garcia, Moreno dan Avni Amin (2016) menjelaskan bahwa melalui pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan dengan harapan dapat meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali belum berperan banyak dalam proses

pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Bhalotra (2018) bahwa perempuan hanya sebagai sarana untuk memperluas hasil pembangunan agar lebih berorientasi pada anak dan perempuan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi korupsi. Dari situ menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan perlu ditingkatkan, bukan lagi sebagai obyek namun subyek.

Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, World Bank (2001) menyebutkan bahwa kesetaraan gender sangat diperlukan. Kemampuan negara untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diperlukan pemerintah yang efektif. Pemerintah dikatakan efektif dalam proses pembangunan jika peraturan yang dikeluarkan menjadikan perempuan bukan semata-mata sebagai obyek sasaran namun yang menguntungkan bagi kemajuan dirinya (Probosiwi, 2015). Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Valeria Esquivel (2016) bahwa perempuan hendaknya diberdayakan dalam proses pembangunan bukan semata-mata untuk memenuhi hak asasinya namun bisa menjadi tenaga penggerak perubahan sosial agar terjadi relasi “kekuasaan” yang seimbang dengan laki-laki. Kedua penulis tersebut hendak menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan secara

langsung maupun tidak dipengaruhi oleh seberapa besar peran perempuan sebagai anggota masyarakat.

Di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa budaya tradisional cenderung patriarki (Agarwal, 1994, Sullivan 1994, Jewkes dkk, 2015). Dalam kondisi seperti ini, perempuan kurang mendapat akses terhadap bidang pendidikan, fasilitas kesehatan dan pekerjaan yang membangun kreativitas. Inilah yang dalam konsep Sen (1990) diistilahkan sebagai “*Missing woman*” untuk menggambarkan kurangnya akses perempuan dalam mendapatkan fasilitas penunjang kehidupan layak. Untuk itu perempuan hendaknya memperoleh hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang cukup sehingga mampu mengambil keputusan sendiri terhadap dirinya, meningkatkan kemampuannya agar bisa memperoleh pendapatan sendiri atau membangun perekonomian sendiri tanpa mengubah budaya dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat (Samarakoon dan Rasyad Parinduri, 2015).

B. Perempuan, Pembangunan dan Literasi

Perempuan pada masa sekarang sudah tidak diragukan lagi akan kesempatannya dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan secara konseptual merupakan proses multidimensi sosial dalam membantu masyarakat memperoleh kontrol terhadap dirinya sendiri. Sebagai suatu proses maka pemberdayaan membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar kemampuannya dalam menentukan pilihan-pilihan terhadap hidup untuk memperoleh manfaat dapat terwujud. Dalam hal ini perempuan yang diberdayakan diharapkan dapat mempertahankan proses yang dijalannya guna mendapat manfaat dari kehidupan rumah tangga, komunitas dan masyarakat luas (Lavarez dan Lopez, 2013). Perempuan yang telah mendapat pemberdayaan menunjukkan peningkatan keadilan gender. Hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat dapat dilaksanakan tanpa harus tergantung pada laki-laki.

Perempuan yang mengalami pemberdayaan sekaligus menunjukkan kebebasannya untuk berkembang sesuai kemampuannya dalam membuat pilihan tanpa dibatasi oleh tradisi kuat yang ada dalam lingkungannya. Pemberdayaan

perempuan saat ini menjadi hal urgen dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah program baru dari PBB dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan sebelum beberapa dekade lalu sering diidentikkan sebagai pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi dari suatu negara sehingga menimbulkan ketimpangan yang dalam antara negara kaya dan miskin (Gunduz, 2004; Drexhage dan Murphy, 2010). Melalui pembangunan berkelanjutan diharapkan proses yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan generasi mendatang bukan hanya dari faktor ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan dilihat dari tujuannya sangatlah mulia untuk mengurangi gap antara negara maju dengan berkembang. Untuk itulah ada 17 sasaran dari pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah pemberdayaan perempuan guna mengurangi ketidakadilan gender. Pendidikan setidak-tidaknya dapat membantu perempuan untuk lebih memahami kemampuan yang dimilikinya, memperbaiki kemampuannya dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam komunitas. Gagasan tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada

perubahan relasi gender dan kepercayaan pada budaya. Pendidikan mampu meningkatkan daya tawar perempuan dalam rumah tangga mengingat kemampuannya dalam pengetahuan, skill dan sumber daya guna menentukan pilihan dalam kehidupan untuk mencapai kesejahteraan (Lunberg & Pollak 1993; Duflo, 2012).

Proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan kebijakan nasional atau publik. Di tengah penyebaran Covid-19 ini kebijakan nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat belum diterima dan dipahami secara benar oleh beberapa kalangan masyarakat. Perempuan sebagai anggota masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi yang benar dari kebijakan pemerintah terutama anggota PKK dari Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Pada awal penyebaran virus Corona atau yang dikenal dengan Covid-19, beberapa anggota kelompok PKK terutama yang sudah berusia lebih dari 50 tahun belum memahami mengapa bisa menyebar dari satu negara ke negara lain dan dengan apa penyebaran tersebut bisa terjadi. Kelompok ini juga belum menerima sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait larangan untuk meninggalkan rumah

kalau tidak terpaksa, penggunaan masker jika keluar rumah dan jaga jarak. Kebimbangan yang dialami oleh para perempuan tersebut disebabkan karena belum pemahannya tentang bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran virus yang mematikan tersebut. Beberapa anggota PKK tersebut belum paham bahwa kebijakan pemerintah di satu sisi bersifat memaksa dan mengekang namu pada sisi lainnya dimaksudkan untuk menjaga agar masyarakat terbebas dari penyakit yang ditimbulkan dari virus tersebut.

Di sinilah pentingnya memberikan literasi kepada para perempuan khususnya anggota PKK tentang kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Transfer teknologi dan pengetahuan diberikan kepada anggota PKK mengingat sebagian besar adalah perempuan yang bekerja dalam rumah tangga meskipun latar belakang pendidikannya cukup beragam mulai dari SMP hingga akademi. Dengan kebiasaan dan ruang lingkup kerja yang hanya mengurus urusan domestik menjadikan sebagian anggota PKK tersebut belum dapat menerima sesuatu yang baru yang menjadikannya kurang nyaman dalam melakukan aktivitas. Kebiasaan yang dilakukan oleh anggota PKK Desa Wirogunan yang berusia diatas 50 tahun sebagai sasaran dari kegiatan ini kesehariaannya pada

pagi hari adalah berbelanja untuk menyiapkan makanan bagi seluruh anggota keluarganya, membersihkan rumah dan merawat cucu karena orang tuanya bekerja. Jumlah perempuan pada kategori usia tersebut 25 orang. Keikutsertaannya dalam mengikuti kegiatan PKK juga tidak rutin yakni sejumlah 13 orang karena cucunya tidak ada yang merawat, sebanyak 7 orang hadir dengan alasan ada acara arisan. Untuk ketujuh orang tersebut mengikuti kegiatan PKK karena berharap mendapatkan uang dari arisan. Sisanya adalah anggota PKK sekaligus pengurus yang harus hadir dan mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Kelompok inilah yang terkadang mencarikan narasumber dari luar desaguna mendapatkan wawasan baru atau sharing pengalaman dari tokoh masyarakat dan akademisi atau bahkan marketing dari suatu produk.

C. Taat Pemerintah, Siapa Takut

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI) dipusatkan di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Desa Wirogunan berasal dari kata

Wiro dan Guna. Kata Wiro atau Wira berarti ksatria atau perwira sedangkan Guna berarti berguna atau bermanfaat sehingga kalau digabung menjadi ksatria yang bermanfaat. Artinya bahwa penduduk dari Desa Wirogunan diharapkan menjadi masyarakat yang memiliki jiwa ksatria agar bisa bermanfaat bagi sesama.

Dilihat dari asal usulnya, Desa Wirogunan merupakan petilasan dari tempat tinggal Pangeran Wiroguna, seorang kepercayaan dari Sunan Pakubuwana 11. Desa Wirogunan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT) dan enam Rukun Warga (RW) serta 2 kebayanan. Kondisi sejarah seperti itulah yang menjadikan desa ini memiliki tempat keramat yang sering dikunjungi banyak orang pada hari tertentu yakni makam dari Pangeran Wiroguna beserta sendang Wirogunan. Saat ini kehidupan masyarakatnya cukup beragam yang didominasi dengan usaha mandiri, buruh, dan pegawai. Sementara Perempuannya yang telah menikah lebih banyak yang tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga atau membuka usaha rumahan dan online.

Peningkatan literasi bagi perempuan yang tergabung dalam PKK mengenai kebijakan pemerintah sangat penting terlebih saat menghadapi pandemi Virus Corona seperti sekarang ini. Kegiatan memberikan literasi tersebut

dilakukan secara manual melalui pertemuan langsung yang dilaksanakan pada awal dan pertengahan bulan Februari yakni tanggal delapan dan 15. Kegiatan ini awalnya diinspirasi oleh ketua Tim Penggerak PKK yang melakukan diskusi dengan akademisi dari Unisri.

Diskusi tersebut membahas mengenai apa dan bagaimana ada virus yang mematikan yang bermula dari Wuhan China bisa menyebar ke berbagai negara, apa ada kaitan antara negara yang satu dengan negara lain dan bagaimana kalau sampai pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang menjadikan anggota masyarakat tidak nyaman. Hasil dari diskusi adalah rencana untuk diselenggarakannya pelatihan yakni literasi bidang politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Tujuan dari kegiatan tersebut selain masyarakat menjadi paham, mengerti tentang kebijakan pemerintah sekaligus juga terjadinya perubahan sikap baik dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan ketaatan pada peraturan pemerintah.

Hasil diskusi tersebut sekaligus merupakan bentuk perijinan yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa Wirogunan kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Unisri. Dari sinilah kegiatan pengabdian

kepada masyarakat dimulai. Sesuai dengan metode yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pada tahap awal melaksanakan kegiatan ini, persiapan dilakukan dengan menyiapkan tempat pelaksanaan seperti ruangan dan perlengkapan pendukung yakni *speaker*, LCD, taplak meja, meja kursi. Kegiatan ini dilakukan dan dikoordinir oleh mahasiswa sebanyak dua orang beserta perwakilan dari pengurus PKK setempat. Mahasiswa juga berkoordinir terkait ketersediaan snack dan absen bagi peserta. Langkah berikutnya adalah pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 pukul 16.00-17.30. Pada tahap ini materi yang diberikan diawali dengan perkenalan dengan Tim Pengabdian Unisri Surakarta. Tim sekaligus menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh akademisi (dosen dibantu mahasiswa) sehingga tidak dipungut biaya dan meyakinkan kepada peserta bahwa informasi yang diberikan tidak bernuansa hoax (mengandung berita bohong). Pada tahap ini Tim Pengabdian sekaligus menginformasikan bahwa jika masih ada peserta merasa ragu terhadap informasi yang disampaikan bisa mengkonfirmasi dengan media massa.

Langkah selanjutnya adalah penyampaian materi sekaligus pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2020. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 16.00-17.30. Hari Sabtu menjadi pilihan yang tepat mengingat pada hari tersebut para peserta sudah berkurang aktivitasnya. Pada kegiatan ini tokoh masyarakat yang hadir adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa dan tiga orang perwakilan dari kecamatan, Kepala Desa, dua dosen pemberi materi beserta dua mahasiswa sehingga keseluruhan yang hadir mencapai 30 orang. Secara umum acara berjalan lancar serta sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Acara pelatihan ini juga diwarnai dengan keaktifan peserta sehingga tanya jawab bisa berjalan dan kegiatan menjadi lebih hidup.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang ditandai dengan penyampaian kata sambutan dari Kepala Desa, Ketua Penggerak PKK dan perwakilan dari kecamatan. Peserta sebelumnya telah melakukan regristerasi dengan memberikan tanda tangan sebelum mengikuti kegiatan. Pemateri pertama-tama menyampaikan tentang apa dan bagaimana proses penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Selanjutnya pemateri menguraikan bahwa seseorang yang terkena virus tersebut dan melakukan perjalanan dapat

menularkannya kepada orang lain. Cepatnya penularan penyakit tersebut salah satu faktor pendukungnya adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat bukan hanya pada level lokal tapi juga nasional bahkan internasional. Ketika seseorang pernah melakukan perjalanan jauh baik luar kota, luar pulau atau luar negeri dan kembali ke wilayah asalnya bisa mempermudah penularan virus tersebut.

Untuk mengantisipasi percepatan terjadinya penularan akibat virus yang mematikan tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan. Peraturan tersebut antara lain untuk menghindari bepergian kalau tidak terpaksa dan jika keluar rumah wajib mengenakan masker. Pemerintah juga mengharuskan untuk sering-sering mencuci tangan guna menjaga kebersihan bahkan kalau sehabis bepergian dianjurkan untuk segera mandi. Komunikasi yang dilakukan secara langsung antara satu orang dengan yang lain hendaknya menjaga jarak sekitar satu meter. Kesemua aturan pemerintah tersebut diuraikan secara jelas dan mendetail oleh pematari guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan dari virus tersebut.

Materi lain yang disampaikan oleh Tim Pengabdian adalah mengenai pemilahan informasi mengenai virus

Corona dari media sosial agar bisa diketahui mana yang benar dan yang mengandung kebohongan (*hoax*) dalam bentuk pelatihan. Tim pengabdian dalam memberikan materi tidak hanya bersifat satu arah. Komunikasi yang berlangsung terlihat cukup aktif dan dua arah sehingga kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan diberi waktu longgar. Pertanyaan yang disampaikan peserta antara lain bagaimana melakukan kegiatan tanpa harus sering meninggalkan rumah, sebagai perempuan yang hanya berkecimpung dalam urusan rumah tangga bagaimana memberitahu suaminya tentang aturan dari pemerintah yang terlihat mengekang, dan bagaimana perempuan dapat mengakses informasi tentang Covid-19 mengingat selama ini masih sangat tergantung pada laki-laki. Dengan kata lain, masyarakat masih menganggap bahwa sumber informasi berasal dari laki-laki sehingga kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk lebih mandiri.

Sebagai evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah: (1) kurangnya pengetahuan yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan skill yang kebanyakan dialami oleh perempuan pedesaan menjadikannya kurang mandiri dalam menentukan pilihan; (2) masih banyaknya perempuan yang

tergantung pada laki-laki yakni suaminya dalam menentukan keputusan; (3) perempuan seringkali menjadi obyek yang mudah dipengaruhi oleh kelompok lain seperti teman atau komunitas. Hal ini bisa terlihat ketika perempuan yang sudah terbiasa menggunakan gawai begitu mendapat informasi akan segera dishare kepada orang lain. Untuk memperkuat pemahaman para ibu anggota PKK pada kegiatan tersebut, peserta diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan pemateri terkait informasi mengenai virus melalui grup *WhatsApp*. Tim pengabdian juga mengajak peserta agar tetap tinggal dan melakukan aktivitas dari rumah guna jika memungkinkan, selalu memakai masker kalau ke luar rumah, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer setiap hendak melakukan aktivitas yang menggunakan tangan, dan menghindari keramaian. Semua informasi tersebut diharapkan dapat membantu peserta pentingnya upaya guna memperlambat penyebaran virus.

D. Daftar Pustaka

- Agarwal, B. (1994). *A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bhalotra Sonia, et.al (2018). Fertility and Labor Market Responses to Reductions in Mortality, paper in a workshop in Nuremberg and the European Economic Association Meetings in Lisbon.
- Dufllo, E. (2012). Women's Empowerment and Economic Development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), (1051–1079).
- Esquivel, Valeria, (2016). Power and the Sustainable Development Goals: a Feminist Analysis, *Gender and Development*, Vol. 24 No. 1 (9-23).
- Garcia, Claudia, Moreno dan Avni Amin (2016). The Sustainable Development Goals, Violence and Women's and Children's Health, *Bull World Health Organ*, (396–397).
- Jewkes, Rachel dkk, (2015). Hegemonic masculinity: combining theory and practice in gender interventions, *Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Care*, Vol. 17, No. S2, (112–127).
- Lopez and Lavarez, (2013). From Unheard Screams to Powerful Voices: A Case Study of Women's Political Empowerment in the Philippines, In 12th National Convention on Statistics (NCS) EDSA Sharing-la Hotel, Mandaluyong City.

- Lundberg, S., & Pollak, R. A. (1993). Separate spheres bargaining and the marriage market. *Journal of Political Economy*, 101(6), (988–1010).
- Murphy, Kevin, 2012. The social pillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. *Sustain. Sci. Pract. Policy* 8 (1), (15-29).
- Probosiwi, Ratih, (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Natapraja, *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3 No. 1, (41-56).
- Samarakoon, Shanika and Rasyad A. Parinduri, (2015). Does Education Empower Women? Evidence From Indonesia, *World Development* Vol. 66, (428–442),
- Sen, A. (1990). More than 100 Million Women are Missing. *The New York Review of Books*, 37 (20).
- Sullivan, N. (1994). *Masters and Managers: A Study of Gender Relations in Urban Java*. St. Leonards, Australia: Allen & Unwin.



BAB II

Instagram Sebagai Saluran Inspirasi Perempuan Selama Pandemi Covid-19

A. Pengantar

Virus corona menjadi tren penyakit baru yang menyebar secara cepat sejak Desember 2019. Penyebaran yang sangat cepat menjadikan virus corona yang dikenal sebagai Covid-19 berubah dari endemi menjadi pandemi. Lebih dari 200 negara mengalami pandemi Covid-19 sejak akhir bulan Mei 2020. Berbagai aspek yang muncul sebagai dampak dari Covid-19 menyebabkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan darurat kesehatan sebagai pandemi. Kondisi ini memerlukan penanganan yang serius dan cepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di seluruh dunia (Popouet, 2021; Campbell & Kahwash, 2020; Bainus & Rachman, 2021).

Pada awalnya, penyebaran positif kasus Covid-19 yang cepat dan tingginya keterpaparan yang dialami masyarakat

memerlukan ketersediaan vaksin dan obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebagai lembaga internasional, WHO menghimbau kepada pemerintah dari berbagai negara untuk melaksanakan protokol kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah kerap menghadapi hambatan dari masyarakat sendiri yang disebabkan oleh kurangnya literasi tentang bahaya krisis pandemi yang tengah dialami dan bagaimana mengatasinya.

Individu atau masyarakat seharusnya mengambil tindakan preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19 misalnya dengan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan menggunakan masker ketika luar rumah (Li & Liu, 2020). Namun, kesadaran individu atau masyarakat tentang kesehatan masih perlu ditingkatkan karena informasi yang beredar dalam masyarakat tentang bahaya Covid-19 terkadang belum jelas sumbernya sehingga terjadi misinformasi. Kurangnya literasi kesehatan dan misinformasi berdampak terhadap upaya preventif dan phobia masyarakat terhadap Covid-19. Metode tradisional yang membutuhkan akses secara fisik seharusnya diganti metode baru yang menggunakan teknologi (ehealth methods) (Brørs et al., 2020) yang dapat memberikan

informasi tentang kesehatan secara akurat (Eysenbach, 2020).

Penggunaan jaringan internet menjadi salah satu cara untuk mempermudah akses informasi tentang kesehatan. Saat ini, kebutuhan individu atau masyarakat terhadap informasi kesehatan dengan menggunakan teknologi internet semakin meningkat selama Covid-19 (Fagherazzi et al., 2020). Penggunaan media sosial sebagai komponen alternatif informasi atau data yang diperhitungkan dalam meningkatkan literasi kesehatan. Beberapa studi empiris sebelumnya menunjukkan bahwa literasi kesehatan dengan menggunakan teknologi internet sangat diperlukan selama Covid-19. Penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan informasi kesehatan dan melakukan komunikasi secara professional dapat mengurangi kepanikan masyarakat dan memutus penyebaran Covid-19 (Yuce et al., 2021; Li & Liu, 2020; Baber et al., 2022).

Untuk itulah, ketika Presiden Indonesia mengumumkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 melalui Keputusan Presiden nomor 7 Tahun 2020 ditindaklanjuti dengan penyediaan saluran informasi terkait Covid-19 dari tingkat pusat hingga daerah. Saluran informasi tersebut digunakan untuk mengurangi kepanikan

dan menyebarkan informasi secara akurat kepada masyarakat serta memantau penyebaran Covid-19. Salah satu saluran informasi yang dikelola secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adalah media sosial Instagram melalui akun Instagram @kemenkominfo dengan 1,7 juta followers dan Kementerian Kesehatan dengan akun @kemenkes-ri. Media sosial Instagram dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai saluran informasi dalam melakukan kampanye sosial selama Covid-19 dengan konten menarik dan mudah dipahami (Tulung, et al., 2021). Pada masa Covid-19 (tahun 2020), penggunaan media sosial Instagram mengalami peningkatan sebanyak 40% (Perez, 2020).

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tingkat daerah. Pemerintah daerah menggunakan media sosial sebagai: 1) sarana melakukan komunikasi dan peluang masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan pemerintah secara virtual; 2) mendistribusikan informasi terkini tentang perkembangan Covid-19 secara cepat dan mudah sesuai kebutuhan masyarakat. Di antaranya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan akun @sapawargasby (Rohman, 2021),

Bupati Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan akun Achmad Husein @ir_achmadhusein (Darmawan, 2020), pemerintah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan akun @pemkabtmg (Mubaroq, Andi Rizqi, Wijayanto, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram pada masa Covid-19 khususnya tahun 2020-2021 diminati masyarakat secara luas dengan pendistribusian informasi yang cepat dan mudah. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, juga melakukan hal yang sama dengan membuat akun Instagram pribadi dengan nama @mbakyuniselaludihati. Akun Instagram Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut sesuai dengan nama bupati Sragen, dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dengan 12ribu pengikut selama tahun 2020-2021. Selama hampir dua tahun, bupati Sragen membuat postingan tentang Covid-19 baik dalam bentuk kalimat ajakan, tanya jawab, motivasi, sosialisasi protokol kesehatan dalam bentuk foto dan video kegiatan.

B. Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sragen Pada Tahun 2020-2021

Sebagai tindak lanjut dari keputusan WHO itu, Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2020 menetapkan bahwa wabah virus corona Covid-19 telah menjadi bencana nasional non-alam (Ihsanuddin, 2020). Pemerintah pusat gencar melakukan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar secara disiplin menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker saat di luar rumah, tinggal di rumah dan menjaga jarak.

Dua bulan berikutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (30 Mei 2020), mengumumkan bahwa sepuluh wilayah kabupaten/kota menempati urutan teratas pada tingkat kasus keterpaparan Covid-19 yakni Kota Semarang, Salatiga, Surakarta, Kabupaten Kudus, Magelang, Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, Temanggung, Cilacap, Banjarnegara, Sragen, Sukoharjo. Kabupaten Sragen menempati posisi kedua tingkat wilayah Solo Raya dengan ditemukan 31 kasus (Budi, 2020). Untuk

mempermudah pemetaan wilayah yang mengalami keterpaparan maka, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah menetapkan tiga zona yakni: Zona merah dengan resiko tinggi ditunjukkan dengan skor 0-1.80, zona oranye dengan resiko sedang ditunjukkan dengan skor 1.81-2.40, kategori zona kuning dengan skor 2.41-3, dan skor lebih dari 3 dikategorikan zona hijau. Berdasarkan data pemetaan zonasi risiko daerah keterpaparan Covid-19 maka Kabupaten Sragen termasuk zona merah (Permatasari, Afrinia, 2021).

Kabupaten Sragen merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, bagian utara Kabupaten Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah timur dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Seiring dengan upaya menghambat percepatan penyebaran Covid-19 di daerah maka, Menteri Dalam Negeri memutuskan bahwa kepala daerah dapat menetapkan status keadaan bencana Virus Corona di wilayahnya. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 440/12622/SJ

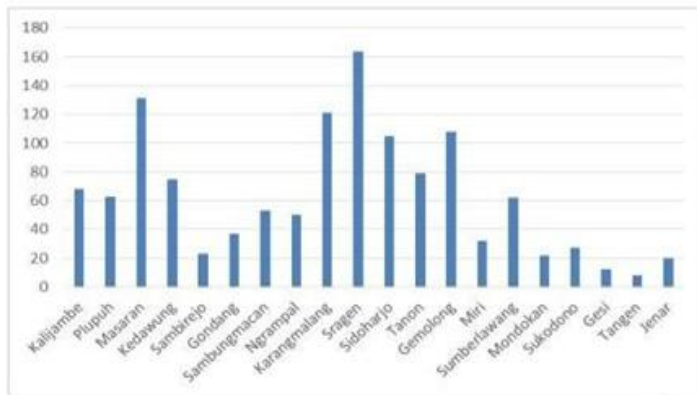
tertanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sragen menindaklanjuti upaya pemerintah pusat dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati No. 320/002/038/2020 tentang Penerapan New Normal pada saat pandemi Covid-19 yang berisi penerapan protokol kesehatan di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, transportasi, area publik, pariwisata, keagamaan dan sektor lainnya serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka jaring pengaman sosial (Sukowati, 2020). Selanjutnya, bupati Sragen yang menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk pertama kalinya pada tanggal 13 April 2020 setelah dua warganya dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona.

Kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, terjadi penambahan tujuh warga Kabupaten Sragen yang terjangkit Covid-19 setelah mengikuti Ijtima Ulama Dunia 2020 di Gowa, Sulawesi Selatan. Penemuan warga Sragen yang terpapar Covid-19 menjadi pendorong dikeluarkannya Surat Edaran Bupati No. 320/002/038/2020 pada tanggal 9 Juni 2020 tentang Penerapan New Normal pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen. Kebijakan Penerapan New Normal juga menjadi respon pemerintah daerah dengan adanya peningkatan jumlah warga yang

terpapar dengan penyebaran di Kecamatan Plupuh, Sidoharjo, dan Masaran (Wardoyo, 2020).

Sampai bulan November tahun 2020, jumlah warga Kabupaten Sragen yang terpapar Covid-19 mencapai 853 orang yang tersebar di 10 kecamatan yakni Masaran, Karangmalang, Sragen, Sidoharjo, Gemolong, Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Tanon dan Sumberlawang. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Pemetaan wilayah terpapar Covid-19 pada Bulan November tahun 2020.

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Bupati Sragen selaku Ketua Satuan Gugus Tugas menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kegiatan masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran

Corona Virus Disease Covid-19 pada bulan Januari 2021. Pada bulan Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Sragen menetapkan Instruksi Bupati Sragen Nomor 360/286/038/2021 yang berisi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi zona merah (Amaliyyah, 2021). Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk melarang kegiatan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT) yang menyebabkan kerumunan seperti kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan untuk mencegah penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Sragen. Pembatasan aktivitas sosial warga misalnya penyelenggaraan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di rumah dengan mengundang 10 orang. Aktivitas pendidikan melalui perubahan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Pembatasan operasional aktivitas ekonomi pedagang kaki lima (angkringan), warung, toko, swalayan, kafe, restoran, rumah makan hanya sampai jam 21.00. Pembatasan aktivitas keagamaan ditunjukkan melalui pelaksanaan ibadah yang hanya boleh dilakukan di rumah.

Satu bulan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Sragen menerapkan PPKM level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021 mulai tanggal 26 Juli-2

Agustus 2021. Pemeringkatan Kabupaten Sragen pada PPKM level 4 didasarkan pada jumlah warga yang terpapar mencapai 271 kasus dalam satu hari (Romadhoni, 2021a). Parameter lainnya untuk Kabupaten Sragen pada PPKM level 4 adalah angka positivity rate mencapai 44,67%, capaian vaksinasi masih rendah sekitar 20%, dan angka kematian mencapai 4,8% (Prass, 2021). Kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati Sragen membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 dengan menggunakan dana desa untuk membeli oximeter. Alat ini digunakan untuk mengukur dan memantau saturasi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pengukuran dan pemantauan warga dilakukan oleh bidan desa.

Pada bulan September 2021, bupati Sragen memutuskan untuk memberikan vaksinasi secara serentak bagi pelajar terutama siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta sejumlah tujuh ribu dosis (Rahayu, 2021). Menurut laporan bupati Sragen yang disampaikan kepada gubernur Provinsi Jawa Tengah, akhir bulan September 2021 capaian vaksinasi untuk masyarakat telah melampaui 50%. Dari data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, terdapat 775.774 sasaran vaksinasi dengan 118.893 orang lansia. Secara umum,

cakupan vaksinasi mencapai 388.369 orang, atau 50.06 % dengan kelompok sasaran lansia yang telah divaksin sebanyak 49.987 orang atau 42.01% (Hidayat, 2021). Peningkatan ketercapaian sasaran vaksinasi menempatkan Kabupaten Sragen pada kategori PPKM level 3.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41/2021 dilanjutkan Instruksi Bupati (Inbup) Nomor: 360/440/038/2021 tanggal 4 Oktober 2021 bahwa Kabupaten Sragen termasuk dalam PPKM level 2. Penurunan PPKM level 2 diikuti dengan pelanggaran kebijakan bupati Sragen yang dalam prakteknya tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Instruksi bupati tersebut berisi: 1) kegiatan pendidikan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau jarak jauh; 2) melaksanakan work from home (50%) dan work from office (50%); 3) pertokoan yang menjual kebutuhan sehari-hari, barang, dan jasa tutup pada jam 21.00 dengan aplikasi peduli lindungi hanya apotik dan toko obat yang buka 24 jam; 4) kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan di rumah ibadat dengan jumlah 75 orang dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat; 5) fasilitas publik diijinkan buka dengan kapasitas 25%, mengikuti protocol kesehatan, menggunakan aplikasi peduli lindungi, dan anak di bawah

12 tahun dilarang masuk; 6) kegiatan olah raga, seni dan hiburan, dan sosial yang mendatangkan kerumunan diijinkan dengan kapasitas 50% orang; 7) kegiatan yang berhubungan dengan transportasi publik dan perjalanan publik berlaku 100% dengan menerapkan protokol kesehatan, menunjukkan kartu vaksin dan PCR H-2; 8) membatasi mobilitas masyarakat pada hari Sabtu dan tanggal merah.

Instruksi bupati Sragen tersebut dimaknai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah daerah kepada masyarakat untuk lebih beradaptasi dalam kehidupan normal baru di tengah Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Stoker dan kawan-kawan (2019) bahwa tantangan seorang pemimpin pada masa krisis mampu menampilkan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (task oriented) dan relasi dengan orang lain (human relation oriented). Untuk itu, bupati Sragen sebagai pemerintah daerah konsisten bekerja berbasis tugas dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19. Sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas di luar rumah dengan lebih bebas dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

C. Literasi Digital Protokol Kesehatan oleh Bupati Sragen Dalam Mengatasi Covid-19

Sejak Covid-19 menyebar ke wilayah Sragen, masyarakat belum paham terhadap krisis kesehatan yang datang secara mendadak. Kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan penyebab virus, ciri, tanda serta gejala, istilah baru yang muncul pada saat Covid-19, proses penularan dan upaya pencegahan (Feby Mukharomah et al., 2021). Masyarakat juga belum menerapkan protokol kesehatan secara disiplin misalnya, membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menghindari menyentuh wajah, melakukan etika secara benar ketika batuk atau bersin, menggunakan masker sesuai standar medis saat berada di luar rumah, jarak minimal satu meter ketika berkomunikasi dengan orang lain, menghindari keramaian, dan tidak keluar rumah kecuali darurat (Suprayitno & Rahmawati, Sylvina, Adivtian Ragayasa, 2020). Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kurangnya kepercayaan terhadap bahaya umumnya menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran untuk mengantisipasi

penyebaran Covid-19 (Prasetyo et al., 2021). Kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tersebut menjadikan masyarakat yang terpapar Covid-19 dikucilkan tetangganya sedangkan yang tidak terpapar namun tinggal berdekatan menjadi semakin cemas, khawatir dan takut tertular sehingga rentan terkena stress (Ilpaj & Nurwati, 2020).

Untuk mencegah semakin banyaknya warga yang terpapar Covid-19, peran pemerintah daerah sangat menentukan. Seperti yang dijelaskan oleh Stoker dan kawan-kawan (2019) bahwa tantangan seorang pemimpin pada masa krisis mengharuskannya untuk menampilkan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (*task oriented*) dan relasi dengan orang lain (*human relation oriented*). Maka, sebagai langkah awal untuk mencegah percepatan penularan Covid-19, Bupati Sragen yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter mengawal pelaksanaan razia penggunaan masker secara serentak di 20 kecamatan (Admin Pemkab, 2020); menjadi vaksinator pelaksanaan pemberian vaksin bagi masyarakat; secara rutin menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan seluruh camat, Muspika, Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta Kepala Puskesmas untuk

memantau perkembangan penyebaran Covid-19 (2Pembab, 2020).

Kegiatan literasi protokol kesehatan untuk mendukung pencegahan percepatan penyebaran Covid-19, dilakukan oleh Bupati Sragen melalui media sosial Instagram menggunakan nama “mbak yuni selalu di hati” dengan tagar #sragenpakaimasker, #guyubrukun, #indonesialawancorona, #dirumahsaja, #cucitanganpakaisabun, dan #sragenbisa dan WhatsApp dengan nomor yang tidak dapat dimunculkan pada artikel ini.

Pembuatan akun Instagram oleh bupati Sragen ditujukan untuk mempermudah penyebaran informasi Covid-19, meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan memotivasi masyarakat untuk berani melawan Covid-19. Berikut akun Instagram bupati Sragen:



Gambar 2. Akun Instagram bupati Sragen

Sumber. Instagram @mbakyuniselasudihati

Seperti yang dijelaskan oleh O'Mara bahwa literasi kesehatan dengan memanfaatkan media sosial lebih efektif karena dapat menjangkau masyarakat yang beragam, menyebarkan informasi kesehatan dengan bahasa populis

yang mudah dimengerti (O'Mara, 2013). Bupati Sragen melakukan sosialisasi literasi protokol kesehatan kepada masyarakat tentang: 1) mencuci tangan menggunakan sabun dan membilas dengan air mengalir, hindari memegang hidung, mulut, mata, serta wajah sebelum mencuci tangan dengan bersih, dan sesering mungkin untuk mencuci tangan setelah menyentuh benda atau menggunakan hand sanitizer/cairan pembersih tangan jika tidak ada air di sekitar, (2) menggunakan masker bila keluar rumah dan saat berada di tempat umum, (3) menutup mulut ketika batuk atau bersin secara benar; 4) menghindari keramaian dan bila berada di tempat umum dengan jarak 1-1,5 meter dengan orang sekitarnya (*physical distancing*), 5) melakukan *self quarantine* di rumah dan tidak berpergian kemanapun kecuali dengan alasan mendesak.

Aktivitas bupati Sragen melalui media sosialnya (Instagram) untuk meningkatkan literasi protokol kesehatan bagi warganya adalah:



Gambar 3. Sosialisasi protokol kesehatan (pola hidup bersih dan sehat) melalui video (gambar kiri) dan kalimat ajakan menjaga kesehatan (gambar kanan)

Sumber. Instagram @mbakyuniselasudihati, 14 Maret 2020



Gambar 4. Mengajak masyarakat dan berbagi ide inovatif dalam bentuk video tutorial pembuatan hand sanitizer

Sumber. Instagram @mbakyuniselasudihati, 14 Juli 2020



Gambar 5. Ajakan melawan corona dengan semboyan “guyub rukun lawan corona” (gambar kiri) dan sarana interaksi warga dengan pemerintah (gambar kanan)

Sumber: Instagram @mbakyuniselaludihati, 2 September 2021

Literasi protokol kesehatan yang dilakukan bupati Sragen melalui media sosial Instagram menunjukkan hasil positif. 1) sosialisasi, motivasi, dan membimbing warga untuk mengambil tindakan yang lebih baik dan aman bagi kesehatan. Sebagai wujudnya adalah sosialisasi pola hidup sehat oleh bupati Sragen melalui foto dan video, dengan 1.233 tanda suka.yang ditunjukkan pada gambar 3; 2) memengaruhi warga untuk mengadopsi, mendukung, dan berbagi ide atau perilaku inovatif ditunjukkan pada gambar 4 melalui video tutorial membuat hand sanitizer sendiri mendapat perhatian masyarakat sejumlah 1.964 tayangan; 3)

memperkuat norma sosial dan membangun komunikasi antara pemerintah dengan warga melalui pengetahuan baru dan pola-pola hidup sehat secara cepat dan meluas, ditunjukkan pada gambar 5 melalui penguatan “guyub rukun” sebagai semboyan warga Kabupaten Sragen melawan corona dan sarana interaksi dengan 3.548 tayangan.

Dari beberapa gambar sebelumnya menunjukkan aktivitas literasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh bupati Sragen kepada masyarakat mampu menekan penyebaran Covid-19. Kepatuhan masyarakat terhadap anjuran, himbauan dan sosialisasi literasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh bupati Sragen melalui akun Instagram sampai bulan Oktober 2021 menunjukkan hasil positif. Sebagai buktinya adalah: 1) jumlah pasien yang menjalani isolasi terpusat telah kosong; 2) sejumlah 856.117 orang telah mendapatkan vaksin; 3) Kabupaten Sragen dikategorikan pada PPKM level 2 sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

D. Daftar Pustaka

- Pemkab, A. (2020, April). Jaring Pengaman Sosial Covid-19: Pemkab Sragen Salurkan 59.087 Paket Sembako bagi Warga Terdampak. *Sragenkab.Go.Id*, 1.
- Admin Pemkab. (2020). *Pemkab Sragen Gelar Razia Penggunaan Masker Serentak di 20 Kecamatan*. Sragenkab.Go.Id.
- Amaliyyah, R. (2021, June 15). Sragen Zona Merah, Bupati Yuni Keluarkan Inbup PPKM Secara Ketat. *SragenKab.Go.Id*, 6.
- Baber, H., Fanea-Ivanovici, M., Lee, Y.-T., & Tinmaz, H. (2022). A bibliometric analysis of digital literacy research and emerging themes pre-during COVID-19 pandemic. *Information and Learning Sciences, ahead-of-p*(ahead-of-print), 214–232. <https://doi.org/10.1108/ils-10-2021-0090>
- Brørs, G., Norman, C. D., & Norekvål, T. M. (2020). Accelerated importance of eHealth literacy in the COVID-19 outbreak and beyond. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 19(6), 458–461. <https://doi.org/10.1177/1474515120941307>
- Budi, T. (2020). Update Corona Jateng 25 Mei: Pasien Positif 1.311 Orang, Kota. *Jateng.Inews*, 1, 1. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>

- Campbell, C. M., & Kahwash, R. (2020). Will Complement Inhibition Be the New Target in Treating COVID-19-Related Systemic Thrombosis? *Circulation*, *141*(22), 1739–1741.
<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047419>
- Darmawan, L. (2020). Instagram Sebagai Ruang Komunikasi Virtual Antara Pemimpin Daerah dengan Publik pada Saat Pandemi Covid-19. *Magister Ilmu Komunikasi*, *2*.
- Eysenbach, G. (2020). How to fight an infodemic: The four pillars of infodemic management. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(6). <https://doi.org/10.2196/21820>
- Fagherazzi, G., Goetzinger, C., Rashid, M. A., Aguayo, G. A., & Huiart, L. (2020). Digital health strategies to fight COVID-19 worldwide: Challenges, recommendations, and a call for papers. *Journal of Medical Internet Research*, *22*(6). <https://doi.org/10.2196/19284>
- Feby Mukharomah, C., Ahmad, M., Pratama, R., Puspita Sari, M., Thoha Putri, A., Muttaqim Maulana, R., & Aris Wibowo, Y. (2021). People's Knowledge and Behavior on the Covid-19 Virus Pandemic. *LaGeografia*, *19*(2), 139–154. <https://ojs.unm.ac.id/Lageografia/article/view/17830>
- Hidayat, I. (2021, September 30). Capaian Vaksinasi Covid-19 Lampau 50 Persen, Bupati Sragen: Target Sudah Terpenuhi. *Sinarjateng.Pikiran-Rakyat.Com*, *6*.
- Ihsanuddin. (2020, April 13). Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional. *Nasional.Kompas.Com*, *5*(1), 43–54.
<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>

- Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123>
- Li, X., & Liu, Q. (2020). Social media use, eHealth literacy, disease knowledge, and preventive behaviors in the COVID-19 pandemic: Cross-sectional study on chinese netizens. *Journal of Medical Internet Research*, 22(10). <https://doi.org/10.2196/19684>
- Mubarog, Andi Rizqi, Wijayanto, S. (2020). *Komunikasi Krisis Pemerintah Kabupaten Temanggung Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. 1*, 1–13.
- O'Mara, B. (2013). Social media, digital video and health promotion in a culturally and linguistically diverse Australia. *Health Promotion International*, 28(3), 466–476. <https://doi.org/10.1093/heapro/das014>
- Perez, S. (2020). Report: WhatsApp has been a 40% Increase in Usage due to Covid-19 Pandemic. In *www.techcrunch.com* (Vol. 25, Issue 1). www.techcrunch.com/2020/03/26/Report: WhatsApp has seen a 40%25 increase in usage due to COVID-19 pandemic %7C TechCrunch
- Permatasari, Afrinia, R. P. (2021). Jogo Tonggo : Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. *Sosio Konsepsia*, 10(2), 177–192. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2423>
- Popouet, S. Y. (2021). COVID-19: Impact and Opportunities in Gabon. *Open Journal of Social Sciences*, 09(08), 167–185. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.98012>

- Prasetyo, W. H., Wijaya, G. P. A., Rachman, R. F., Amini, M. Z., Wijaya, E. J., Ati, D. L., & Prabowo, A. (2021). Peningkatan Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Masyarakat Desa Baleharjo, Sragen. *Buletin KKN Pendidikan*, 3(1), 91–99. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v3i1.12979>
- Prass, A. B. (2021, July 27). Status Sragen Naik dari PPKM Level 3 ke Level 4. *Krjogja*, 3–4. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/solo/status-sragen-naik-dari-ppkm-level-3-ke-level-4/2/>
- Rahayu, T. F. N. (2021, September 9). Vaksinasi Siswa SMP di Sragen Dimulai Jumat 10 September. *Bisnis.Com*, September, 6. <https://semarang.bisnis.com/read/20210909/535/1439882/vaksinasi-siswa-smp-di-sragen-dimulai-jumat-10-september>.
- Rohman, H. (2021). Analysis of Instagram Media Account @ Sapawargasby Surabaya City Government About Covid-19 Information: Analisis Akun Media Instagram @ Sapawargasby Pemerintah Kota Surabaya Tentang Informasi Covid-19. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 14, 1–5.
- Romadhoni, B. A. (2021a, July 10). Lonjakan Kasus Covid-19 di Sragen Pecahkan Rekor Terbaru 271 Orang Terpapar dalam Sehari. *Solopos.Com*, 6.
- Romadhoni, B. A. (2021b, August 8). Angka Kasus Positif Corona Turun , PPKM Sragen Segera Turun ke Level 3. *Solopos.Com*, 5. <https://www.solopos.com/angka-kasus-positif-corona-turun-ppkm-sragen-segera-turun-ke-level-3-1144855>

- Stoker, J. I., Garretsen, H., & Soudis, D. (2019). Tightening the leash after a threat: A multi-level event study on leadership behavior following the financial crisis. *Leadership Quarterly*, 30(2), 199–214. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.08.004>
- Sukowati, K. U. Y. (2020). *Surat Edaran Penerapan New Normal Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sragen* (Vol. 9, Issue 255). Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
- Suprayitno, E., & Rahmawati, Sylvina, Adivtiani Ragayasa, M. Y. P. (2020). Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19. *Journal of Health Science Research*, 2(1), 1–9. <http://www.informaticsjournals.com/index.php/jhsr/article/view/8530/13618>
- Tulung, Andrea Amorita, Sri Ulya Suskarwati, V. C. A. (2021). Instagram Sebagai Media Government Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika di Masa Pandemi Covid-19. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 5(2), 137–153.
- Wardoyo, P. (2020, June 13). BREAKING NEWS : Meroket Tajam , 6 Warga Sragen Kembali Positif Terpapar Covid-19 . Total 46 Kasus Positif , Tambahan Positif Baru Berasal. *Joglosemar.Com*.
- Yuce, A. E., Albayrak, A., Baran, B., & Kalafat, Ö. (2021). Role of factors in eHealth literacy in period of COVID-19: a study of Turkey. *Health Education*. <https://doi.org/10.1108/HE-07-2021-0105>



BAB III

Peran Ganda Perempuan Selama Pembelajaran Jarak Jauh

A. Pengantar

Peran ibu dalam keluarga di tengah pandemi Covid-19, masihkah menjadi sebuah ambiguitas untuk melepaskan anak-anak dari belenggu gadget. Itulah pertanyaan yang terkadang muncul dalam masyarakat dengan nilai-nilai patriarkhi yang masih kental. Gambaran dari masyarakat yang masih mendukung sistem sosial patriarkhi belum sepenuhnya mempercayakan perempuan untuk bersentuhan secara langsung dengan isu-isu atau permasalahan publik yang berkembang. Seperti kondisi sekarang yang masih diterpa virus Covid-19. Penyebarannya yang begitu cepat dan mudah belum bisa diatasi secara sempurna oleh pemerintah dan masyarakat. Perempuan dalam keluarga yang berperan sebagai ibu baik yang berstatus wanita karier

atau wanita rumahan dihadapkan dengan kemalasan para generasi milenial.

Sebuah fenomena terbaru anak-anak usia sekolah, ketika aktivitas dalam ranah publik “Dihentikan” dan diganti dengan domestik. Aktivitas domestik tersebut mengikatkan anak-anak pada aktivitas yang bersentuhan secara langsung dengan hasil teknologi yakni gadget. Gadget atau gawai seakan menjadi “Ruh” bagi para generasi milenial sehingga tidak dapat melepaskannya walau dalam hitungan detik. Kegiatan anak mulai dari bangun tidur pada pagi hari sampai waktunya tidur malam, tanganya akan selalu menggeser layar sesuai keinginannya. Gadget sebagai teknologi telah mengikat anak-anak sehingga menimbulkan keengganan untuk melakukan aktivitas fisik yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Beberapa akademisi berpendapat bahwa teknologi memiliki sifat otonom yang bersifat imparial sehingga tergantung pada penilaian dan tujuan dari penggunaanya (Triastuti, 2013). Teknologi mengalami komodifikasi dengan mengadaptasi budaya lokal. Keluarga dianggap sebagai prototipe budaya lokal sehingga teknologi disesuaikan dengan kebutuhan domestik dan berintegrasi

dengan kehidupan sehari-hari dalam wilayah domestik tersebut (Vekiri L & Chronaki, 2008).

Ketika anak-anak semakin banyak yang kecanduan gawai selama masa pandemi yang mengharuskan untuk belajar dari rumah saja, perempuanlah (baca: ibu) yang menjadi sasaran. Perempuan secara langsung maupun tidak, diwajibkan untuk memiliki kontrol, pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak. Segala perubahan perilaku anak sebagai pengaruh dari penggunaan gawai dibebankan kepada perempuan karena merekalah yang memiliki waktu panjang bersama anak-anak. Harapan sosial masyarakat terkait dengan peran gender dalam lingkup keluarga seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai individu. Harapan sosial masyarakat kepada perempuan dikaitkan dengan sifatnya yang penuh kehangatan, kehalusan, pengertian, kesadaran akan perasaan orang lain. Sehingga seperti yang diasumsikan oleh Fisher (2000) bahwa perempuan hendaknya sebagai pengasuh dalam keluarga, dengan memberikan perhatian pada orang lain berdasarkan relasi interpersonal.

B. Pola Pengasuhan Ibu Terhadap Anak di Tengah Pandemi COVID-19

Peran gender semakin nyata dan kompleks ketika perempuan menempuh kehidupan baru yang diawali dengan sebuah penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam upacara pernikahan. Dikatakan nyata dan kompleks karena bukan sebatas sebagai pendamping suami, yang melayani dan menyayanginya sehingga perlu bersolek. Setelah kelahiran anak, peran perempuan semakin bertambah bukan sebatas memberikan ASI (air sus ibu) namun juga merawat dan mendidiknya. Rutinitas yang dilakukan seperti ini bagi seorang perempuan akan berlangsung terus-menerus seiring dengan perkembangan usia anak (Izumi, 2018). Posisi anak dalam hal ini bukan semata-mata sebagai buah cinta antara laki-laki dan perempuan namun sebagai aktor baru dalam proses pembangunan di kemudian hari. Peran perempuan sangatlah penting dalam hal ini sebagai agen untuk mempersiapkan aktor pembangunan dan perubahan sosial.

Padahal, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan unit pengasuhan untuk mengajarkan dan mempelajari norma atau nilai-nilai yang diajarkan dalam

agama, dan yang berlaku dalam masyarakat. Pengasuhan meminjam istilah dari Elmanora (2017) diidentifikasi sebagai pola perilaku yang diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui interaksi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dukungan. Pengasuhan dalam keluarga yang diwujudkan melalui interaksi sekaligus ekspresi dan pentransferan pesan dari orang tua kepada anaknya menurut Kamila disebut sebagai gaya pengasuhan (2020). Pola serta gaya pengasuhan dalam keluarga hendaknya dilakukan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan secara seimbang namun disayangkan bahwa masih banyaknya keluarga yang membebankan pengasuhan anak “Hanya” kepada ibu.

Masyarakat Jawa masih diwarnai dengan nilai-nilai yang menyiratkan adanya inferioritas kepada perempuan hingga menyediakan seluruh waktu, tenaga dan pikiran untuk pemeliharaan rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan saat ini, menjadikannya sebagai sosok yang mandiri, berwawasan, serta mampu mengoperasikan teknologi. Perempuan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dengan menggunakannya secara bijaksana. Perempuan dituntut

bukan saja sebagai ibu rumah tangga tapi juga partner pemerintah yang terlibat dalam proses pembangunan. Sesuai dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), bahwa penguasaan teknologi dalam perspektif kesetaraan gender bukan saja untuk menyeimbangkan hak dengan laki-laki namun juga sebagai langkah nyata pemberdayaan perempuan (Wibowo, 2011).

Tumbuh kembang anak sebagai insan didasarkan pada keseimbangan antara fisik dan mental, antara emosi dan rasionalitas dipengaruhi oleh keluarga. Proses yang dilalui anak seperti itu membutuhkan keterlibatan antara ayah dan ibu. Peran sosial ayah dalam masyarakat Jawa telah diamini dengan aktivitasnya pada ranah publik sehingga dianggap wajar kalau kurang terlibat secara langsung dalam proses tumbuh kembang anak. Di sisi lain, peran sosial ibu dalam masyarakat Jawa melekat adanya tanggung jawab terhadap urusan domestik dengan membesarkan anak untuk menjadi insan dengan karakter humanis. Pola pengasuhan ibu terhadap anaknya pada masa pandemi menjadi lebih besar karena keluarga menjadi ruang pendidikan pertama dan utama. Pertama, perempuan pada era digital dituntut membuka diri agar memiliki wawasan teknologi yang luas. Kedua perempuan hendaknya mampu mengedukasi dan

mendidik dengan metode yang fleksibel dan bijaksana terutama dalam penggunaan hasil teknologi. Ketiga, penguasaan teknologi yang diajarkan ke anak-anak tidak dapat dilepaskan dari pemeliharaan nilai-nilai luhur yang merupakan identitas nasional bangsa.

Secara praktis, peran gender dari perempuan di tengah masa pandemi Covid-19 ini berkaitan dengan upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gawai secara berlebihan. Pertama, memberikan edukasi kepada anak tentang apa, bagaimana dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gawai, misalnya dengan memberi batasan waktu atau konten tertentu beserta sanksi terhadap pelanggarannya. Kedua, memberikan aktivitas fisik kepada anak seperti dengan mengajaknya berkebun atau memelihara binatang bahkan dengan beternak. Ketiga, mengajarkan berwirausaha. Keempat, menyediakan buku bacaan yang ringan sesuai minat dan hobi anak guna menghibur dan mengurangi kebosanan. Kesemua aktivitas itu jika dilakukan tanpa paksaan namun tetap dalam pendampingan, pemantauan dan pengawasan ibu sebab sosok inilah yang memiliki ikatan kuat dengan anak-anaknya. Melalui keempat langkah tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak

negatif dari penggunaan gawai secara berlebihan pada anak usia sekolah.

C. Penutup

Peran perempuan dalam keluarga terutama sebagai ibu dituntut adanya tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkembangan anak pada masa pandemi Covid-19 ini. Perempuan sebagai ibu yang memiliki ikatan batin dan berinteraksi secara langsung dengan anak-anak dituntut untuk mendidik dan mengajarkan nilai-nilai moral yang baik kepada buah hatinya. Untuk itu pada masa pandemi Covid-19 ini, perempuan sekaligus diajak untuk berperan sebagai aktor yang paham dan menguasai teknologi komunikasi dan informasi secara baik dan bijaksana. Bonus peran yang disemangatkan kepada perempuan pada masa pandemi ini diharapkan dapat mengedukasi, memantau dan mengawasi anak-anak dari pengaruh negatif penggunaan gawai secara berlebihan.

D. Daftar Pustaka

- Elmanora, Hastuti, D., dan Muflikhati, I. (2017). Lingkungan Keluarga Sebagai Sumber Stimulasi Utama untuk Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 10(2), 143-156.
- Fisher A.H, (2000). *Gender and Emotion, Social Psychological Perspectives*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Izumi, M. dan Gullon-Rivera, A. L. (2018). Family Resilience Among Sojourning Japanese Mothers: Links to Marital Satisfaction and Children's Behavioral Adjustment. *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 46(3), 282- 296.
- Kamila, Aisyatin, (2020). Peran Perempuan sebagai Garda Terdepan dalam Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 01, No. 02, 75-83.
- Lestari, Dian. (2016). Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak). *MUWAZAH* 8, no. 2.

Triastuti, Clara Endah, (2013). Technophobia dan Internet Efficacy Scale (Tingkat Keyakinan Diri terhadap Kemampuan Mengaplikasikan Internet): Studi Blogger Indonesia, dalam Jurnal Perempuan, Gender dan Teknologi, Vol. 18, No. 3.

Vreniki L & Chronaki A, (2008). Gender Issues in Technology Use, Journal of Computers and Education, 51, 392-404.

Wibowo, D. E. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. Gender, 3(1), 356–364.



BAB IV

Sentuhan Budaya Jawa untuk Mengatasi Covid-19

A. Pengantar

Pada akhir bulan Januari tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 (Fahriyani et al., 2021). Sebagai tindak lanjutnya, Direktur Jenderal WHO menghimbau kepada pemerintah seluruh dunia untuk waspada dan siap menghadapi serta mengupayakan pencegahan terhadap cepatnya penyebaran virus Corona (Indriani et al., 2020). Kondisi tersebut memaksa para pengambil keputusan untuk mencari solusi secara cepat dan tepat. Perbedaan jenis kelamin para pemimpin politik dengan praktik gaya kepemimpinan bergender turut memengaruhi berhasil tidaknya dalam mengatasi pandemi Covid-19 (Luoto & Varella, 2021). Berdasarkan bukti empiris kinerja pemimpin, level negara maupun daerah, bahwa pada periode pertama (April sampai Desember 2020)

menunjukkan sejumlah pemimpin perempuan yang diasumsikan menerapkan gaya kepemimpinan politik yang komunikatif, empati, merakyat, dan memberdayakan dinilai berhasil dalam menekan risiko kesehatan dan kematian akibat pandemi Covid-19 di wilayahnya. Penilaian keberhasilan dalam mengatasi Covid-19 diukur dari indikator: kecepatan respon, jumlah yang terinfeksi, jumlah kematian, luasnya penularan (Han & Sheng, 2020; Anabarja, 2020).

Di Indonesia, penelitian-penelitian sebelumnya terkait kepemimpinan kepala daerah perempuan yang dinilai berhasil dalam mengatasi Covid-19 di antaranya adalah walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany (Zahra, 2020), Bupati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah (Nurrohman & Ramadhan, 2020; Sultan & Tirtayasa, 2020), dan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab (Wahyuni & Hertati, 2021). Secara garis besar, para pemimpin politik perempuan tersebut memperlihatkan kepemimpinan yang penuh perhatian, komunikatif, dan merakyat. Kepemimpinan politik perempuan lebih fokus pada usaha mencegah percepatan penyebaran virus, meminimalkan penderitaan dan merawat masyarakat yang terpapar Covid-19 (Luoto & Varella, 2021), sehingga mampu mempertahankan

kepemimpinan politiknya (Johnson & Williams, 2020; Hogan, 2021).

Di Provinsi Jawa Tengah, kepala daerah Kabupaten Sragen dikategorikan mampu mengatasi Covid-19 dengan menampilkan gaya kepemimpinan bergender feminin yang diwarnai dengan budaya Jawa-Surakarta. Budaya Jawa dalam konteks penelitian ini meliputi budaya dari masyarakat yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga budaya tersebut juga masih berlaku bagi penduduk yang tinggal di Kota Surakarta dan sekitarnya atau yang dikenal dengan Solo Raya (Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten). Secara geografis, bagian utara Kabupaten Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah timur dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Aliran Sungai Bengawan Solo yang membelah wilayah Kabupaten Sragen menjadi salah satu penyebab kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tanah pada wilayah bagian utara Sungai Bengawan Solo kurang subur karena merupakan bagian dari deretan Pegunungan Kendeng (pegunungan

kapur). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan mengalami kemiskinan, sedangkan wilayah bagian tengah dan selatan, sebaliknya. Guna menunjang kehidupan, masyarakat melakukan mobilitas ke luar wilayah Kabupaten Sragen untuk bekerja atau dalam bahasa setempat boro (migrasi sirkuler). Istilah tersebut sekarang meluas konotasinya bukan hanya bekerja tetapi menuntut ilmu yang berimplikasi secara praktis bagi perkembangan sosial ekonomi daerah asal untuk jangka pendek dan jangka panjang (Subadi, 2004). Mayoritas masyarakat Sragen beragama Islam yang dipadukan dengan ajaran Kejawan (Javanisme). Kepercayaan Kejawan dipercaya masyarakat sebagai dasar untuk mencapai tujuan keselamatan dan kebahagiaan, yang menekankan pada ketentraman batin, keselarasan, narima (menerima tapi tidak pasrah), andhap asor (rendah hati), eling-waspada (mawas diri), sabar, dan prasaja (sederhana) (Siswanto, 2016). Kejawan sekaligus wujud kesatuan antara manusia dengan Tuhan, diistilahkan dengan Islam Kejawan (Yogiswari, 2020), Bagi masyarakat Jawa yang menganut Islam Kejawan, kedekatan dengan para leluhur dan pencipta alam semesta adalah hal terpenting. Ritual atau upacara persembahan dengan sesaji dilakukan untuk menyembah Tuhan dan menghormati

leluhur sehingga tidak menjadi masalah apabila menganut lebih dari satu kepercayaan (Munna & Ayundasari, 2021).

Kabupaten Sragen yang secara geografis berdekatan dengan Kota Surakarta berdampak pada nilai-nilai budaya yang mengalami akulturasi. Falsafah kepemimpinan politik Hasta Brata yang disimbolkan dengan delapan sifat-sifat mulia dari alam semesta dianggap layak dijadikan pedoman bagi seorang pemimpin daerah (Hamim, 2014). Untuk memperkuat kepemimpinan politik, Raja Mangkunegara IV dari Pura Mangkunegaran menyusun Serat Wedhatama yang menggambarkan kekuatan batin pemimpin secara vertikal dengan Tuhan (Boogert, 2015).

Selama ini kepemimpinan dalam konteks budaya Jawa tradisional direpresentasikan pada sosok laki-laki. Masyarakat Jawa yang patriarki masih lekat dengan gender laki-laki sebagai pemimpin ideal seperti Danang Sutawijaya dengan gelar Kangjeng Panembahan Pasopati dari Kerajaan Mataram, bukan hanya dikenal sebagai raja sakti dan pemberani namun adil, merakyat dan bijaksana serta mampu mengendalikan hawa nafsu dengan menyatukan diri pada Tuhan (Susetya, 2016). Gaya kepemimpinan politik bergender laki-laki yang diwarnai oleh budaya setempat dapat ditemukan pada beberapa

penelitian: bupati Polewali, Drs. Andi Ali Baal Masdar M.Si (Fibriani, 2014); bupati Sidenreng Rappang, Ir. H. Dollah Mando (Rasyid, 2013); walikota Semarang, Dr. Hendrar Prihadi, SE, MM (Purba, 2015). Pada masa krisis, gaya kepemimpinan politik bergender perempuan justru dinilai mampu mengatasi permasalahan, salah satunya ditampilkan oleh bupati Sragen.

Bupati Sragen, dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati atau yang dikenal dengan panggilan Mbak Yuni merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan mantan bupati yakni H. Untung Saroni Wiyono Sukarno dan Suparmi. Sebagai penduduk asli Sragen, ajaran nilai-nilai moral kepemimpinan yang digambarkan dalam bentuk wayang diajarkan oleh H. Untung Saroni Wiyono Sukarno kepada anak-anaknya dan masyarakat melalui kegiatan mendalang (Soekedy, 2008). Sebagai anak, dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang bergender perempuan mengemban amanah untuk mengamalkan nilai-nilai Jawa dalam gaya kepemimpinannya sebagai bupati Sragen. Gaya kepemimpinan politik yang ditunjukkan oleh bupati Sragen disesuaikan dengan budaya setempat sehingga lebih bisa diterima dan dilegitimasi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Keutamaan yang dapat digali dari kesenian wayang yang dipahami oleh seorang bupati Sragen memiliki kaitan dengan falsafah kepemimpinan Jawa-Surakarta yakni Hasta Brata dan Serat Wedhatama. Kedua falsafah kepemimpinan tersebut menuntun seseorang untuk menjadi pemimpin yang demokratis, berempati, berkomunikasi, dan merakyat, adil, dan tanpa pamrih. Kedua falsafah kepemimpinan Jawa, Hasta Brata dan Serat Wedhatama memunculkan gaya kepemimpinan utama yang menurut Sunarni, (2016) dicapai melalui lima M yakni: melek (perhatian terhadap lingkungan), milik (handarbeni/merasa memiliki), muluk (mengentaskan kemiskinan), melok (merealisasikan aspirasi rakyat), dan meluk (merakyat). Bertitik tolak dari falsafah kepemimpinan dalam konteks budaya Jawa-Surakarta tersebut, seorang pemimpin menempatkan keselarasan dan harmoni dalam kehidupan secara vertikal (dengan Tuhan) dan horisontal (dengan masyarakat dan alam semesta).

Kepemimpinan Bupati Sragen teruji melalui gaya kepemimpinannya, dalam mengatasi Covid-19. Pada kwartal pertama hingga pertengahan tahun 2020, masyarakat Kabupaten Sragen menunjukkan risiko

keterpaparan Covid-19 pada level tinggi, yang digambarkan pada peta dengan mayoritas berwarna merah.

Kabupaten Sragen menempati zona merah dengan tingkat keterpaparan sejumlah 24.755 dan jumlah kematian 765 orang yang tersebar pada 10 Kecamatan (Masaran, Karangmalang, Sragen, Sidoharjo, Gemolong, Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Tanon dan Sumberlawang) dari 20 kecamatan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji gaya kepemimpinan politik yang bergender dari Bupati Sragen dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati dalam mengatasi Covid-19 pada gelombang pertama yang diwarnai nilai-nilai dalam falsafah Hasta Brata dan Serat Wedhatama melalui lima M. Kajian tersebut menarik dan penting mengingat gaya kepemimpinan politik kontemporer yang diterapkan oleh kepala daerah perempuan dalam menjalankan pemerintahan pada masa Covid-19 akan memiliki warna yang berbeda.

B. Gender Feminin pada Gaya Kepemimpinan Politik

Kepemimpinan politik dalam perspektif tradisional terkait dengan kedaulatan negara, militer, dan keamanan negara (Tang, 2017). Kepemimpinan politik secara klasik berkaitan dengan legitimasi, pengaruh, kapasitas persuasif, karisma, atau paksaan dalam menjalankan kekuasaan dan hirarki administratif pemerintahan (Ahlquist & Levi, 2011). Ciri-ciri yang ditampilkan dalam kepemimpinan politik sebenarnya wujud relasi yang terbentuk antara pemimpin dengan yang dipimpin melalui perhatian, penghormatan, kesetiaan, dan kepatuhan. Gagasan yang diusung oleh Nawaz & Khan, (2016) mendukung The Great Man Theory bahwa laki-laki pantas menjadi pemimpin politik dengan keberaniannya, berkompetisi dengan mengandalkan kekuatan seperti yang ditunjukkan oleh Hitler dan Napoleon.

Dalam ranah politik, feminisme hadir untuk menunjukkan konstruksi identitas gender dengan memunculkan gagasan normatif tentang apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini perlu dipertegas kembali perbedaan antara “Seks” sebagai

kondisi biologis yang sifatnya melekat dan “Gender”. Menurut Irish Young (dalam Cornwall & Goetz, 2005) gender merupakan bentuk abstrak dari struktur sosial masyarakat yang tercipta dari hasil pengalaman individu secara kompleks yang berfokus pada politik. Gender juga dipahami sebagai asumsi yang dibangun secara sosial yang ditetapkan berdasarkan pada tubuh laki-laki atau perempuan beserta perilaku yang ditampakkannya.

Joni Lovenduski (dalam (M. Hawkesworth & Kogan, 1992) beranggapan bahwa gender mengacu pada jenis kelamin perempuan dianggap inferior, kurang kompeten, tidak cukup penting dan secara luas diyakini kurang politis dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan negatif tersebut bagi Cheung Matthew Sung, (2012) cukup beralasan mengingat klaimnya tentang perempuan secara global berkarakter lebih halus daripada laki-laki, dimasukkannya gender sebagai perspektif baru dalam politik adalah untuk meningkatkan kesetaraan gender (M. Hawkesworth & Kogan, 1992). Sarah Childs dan Mona Lena Krook (2006) menganggap penting gender sebagai perspektif baru dalam kepemimpinan politik dalam lingkup organisasi, institusi formal maupun proses dan praktek politik.

Menurut Alice H. Eagly dan Blair T. Johnson (1990) terdapat perbedaan gaya kepemimpinan politik maskulin dan feminin. Gaya kepemimpinan feminin lebih demokratis, menekankan partisipasi sedangkan maskulin cenderung otokratis sehingga kepemimpinan maskulin sering menerapkan gaya transaksional. Kepemimpinan politik perempuan mengarah pada kerjasama, kolaborasi, penyelesaian masalah didasarkan pada intuisi, empati dan rasional sehingga dikategorikan pada gaya transformasional. Gaya kepemimpinan feminin yang umumnya diperankan perempuan tersebut dapat diterapkan pada berbagai situasi dan budaya (Kark, 2004; Sanjaya, 2015). Ada beberapa kemampuan yang ditunjukkan melalui gaya kepemimpinan feminin yakni pendelegasian, manajemen konflik, adaptasi individu, obyektif, perhatian (Burke & Collins, 2001). Faizan dan teman-temannya (2018) menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan feminin yang dilakukan oleh perempuan biasanya mengandalkan struktur jejaring sehingga mengutamakan sinergi dan bekerja sama serta memberdayakan sedangkan maskulin kekuatan hirarki.

C. Falsafah Gaya Kepemimpinan Politik dalam Konteks Budaya Jawa-Surakarta

Pemimpin dalam konteks budaya Jawa bukan hanya terkait dengan permasalahan duniawi namun diartikan sebagai penguasa sekaligus wakil atau titisan dewa (Sang Pencipta) (Kurniawan, 2019). Budaya Jawa dalam konteks penelitian ini meliputi budaya dari masyarakat yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga budaya tersebut juga masih berlaku bagi penduduk yang tinggal di Kota Surakarta dan sekitarnya atau yang dikenal dengan Solo Raya (Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten). Ada tiga syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni menguasai ilmu (wilayah rasional), ngelmu (kesaktian yang termasuk wilayah batin) dan unsur wahyu yang merupakan legitimasi alam. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, seorang pemimpin dalam konsep tradisional (kraton), diwajibkan untuk menjalankan tirakat (ekspresi kebatinan) misalnya dengan tapa brata untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain (Susetya, 2016). Ciri pemimpin politik dalam konteks budaya Jawa termasuk Surakarta menurut Sunarni,

(2016) adalah monocentrum (figur tunggal), metafisis (didapat karena wahyu, wangsit, pulung, drajat, keturunan/nunggak semi), pragmatis (melalui tirakat, ritual, lelaku, tapa brata), etis (bermoral tinggi, dapat membedakan yang baik dan buruk), sinkretis (mengambil konsep atau nilai penting dari berbagai agama). Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa dalam masyarakat Jawa, sebenarnya pemimpin tidak diprioritaskan pada salah satu jenis kelamin.

Dalam masyarakat Jawa kuna telah hadir perempuan yang berperan dalam politik pemerintahan sebagai seorang pemimpin/negarawan (bukan ratu sebagai permaisuri raja). Dalam disertasi Nastiti, (2009) yang berjudul Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (abad 8-15 Masehi) menjelaskan bahwa pada masa tersebut telah ada kesetaraan dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki yang dibuktikan dari 14 wilayah yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, sembilan di antaranya dipimpin oleh perempuan. Bukti lain yang menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan hak untuk menduduki jabatan publik (politik pemerintahan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga terdapat pada

karya Negarakrtagama, Sri Tanjung, Calon Arang, dan Pararaton (Munandar, 2015).

Nilai-nilai kepemimpinan Jawa yang diadopsi pemimpin untuk menjalankan tugasnya dikenal dengan falsafah Hasta Brata dan Serat Wedhatama. Hasta Brata merupakan karya sastra dari Karaton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran (As'ad et al., 2011). Hasta Brata berasal dari Bahasa Sansekerta, merupakan ilmu dari delapan perwatakan alam yang terurai dalam delapan watak bumi, api, air, angkasa, angin, matahari, bulan, bintang atau yang dalam bahasa Jawa dikenal bumi, geni, banyu, langit, bayu, surya, candra, dan kartika (Azhar, 2017; Kurniawan, 2019). Hasta Brata merupakan ilmu dari delapan perwatakan alam yang terurai dalam delapan yakni: 1) api/dahana (berwibawa, tegas, berani menegakkan keadilan), 2) air/tirta (beradaptasi dengan lingkungan dan tidak pilih kasih), 3) angin/samirana (tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah percaya), 4) bumi/kisma (murah hati, tangguh, peduli, dan melayani), 5) bulan (ramah, lemah lembut, sabar, arif bijaksana, dan visioner), 6) bintang/kartika (visioner, perhatian, menjadi pedoman, dan menginspirasi), 7) matahari/surya (memberi kekuatan, memotivasi, dan membimbing), dan 8) samodra/lautan

(lapang dada untuk menerima siapa pun). Serat Wedhatama terdiri dari Serat yang berarti surat, Wedha artinya kawruh, pengetahuan atau ilmu dan Tama yang artinya utama, bagus atau sempurna. Ada empat tembang macapat yang terfapat dalam Serat Wedhatama yakni Pangkur, Sinom, Pocung dan Gambuh, sebagai keseimbangan pengetahuan antara kehidupan rohani dan jasmani (Boogert, 2015). Serat Wedhatama merekomendasikan kepada para pemimpin Jawa untuk memiliki perilaku dan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai moral yakni satriya (pemberani, jujur, membela kebenaran dan keadilan), prasaja (sederhana), rila (tanpa pamrih), setya budya (berilmu) dan agama ageming aji (taat pada ajaran agama) (Azhar, 2017; Kurniawan, 2019; Widodo, 2016).

Gaya kepemimpinan Jawa yang utama menurut Sunarni (2016) dapat dicapai melalui 5 M yakni: Melek (perhatian), Milik (merasa memiliki), Muluk (sederhana), Melok (empati), dan Meluk (merakyat). Bertitik tolak dari falsafah kepemimpinan politik dalam konteks masyarakat Jawa tersebut, seorang pemimpin menempatkan keselarasan dan harmoni dalam kehidupan secara vertikal (dengan Tuhan) dan horisontal (dengan masyarakat dan alam semesta). Guna menyelaraskan harmoni kehidupan, maka nilai-nilai

moral seperti narima (menerima tapi tidak pasrah), sabar, eling lan waspada (mawas diri dan tidak lengah), prasaja (sederhana) serta andhap asor (rendah hati) hendaknya dilaksanakan oleh pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Sebagai gambaran pelaksanaan gaya kepemimpinan politik Jawa yang ditunjukkan oleh negarawan perempuan seperti yang disampaikan oleh Titi Surt Nastiti, (2009) melalui disertasinya yang berjudul Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (abad 8-15 Masehi) yakni perempuan sebagai pemimpin wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Di wilayah Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah juga terdapat raja perempuan, Ratu Shima dan Ratu Kalinyamat yang terkenal adil, perhatian, empati, sederhana, merakyat dan bijaksana bahkan Ratu Kalinyamat berani melawan Portugis (Ningsih, 2021;Aji, 2020).

D. Gaya Kepemimpinan Bupati Sragen Dalam Mengatasi Covid-19

Gaya kepemimpinan Bupati Sragen sebagai perempuan dalam mengatasi Covid-19 semakin teruji pada gelombang pertama. Kabupaten Sragen dari awal dinyatakan Keadaan

Luar Biasa oleh bupati pada tanggal 13 April 2020, pada bulan Juni 2020 menempati zona merah tersebar pada 10 Kecamatan (Masaran, Karangmalang, Sragen, Sidoharjo, Gemolong, Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Tanon dan Sumberlawang) dari 20 kecamatan. Sampai dengan bulan Desember 2020, tingkat keterpaparan seluruh warga Sragen sejumlah 24.755 dan jumlah kematian mencapai 765 orang. Fakta tersebut menjadi tantangan bagi kepemimpinan Bupati Sragen dengan kondisi masyarakat belum paham terhadap persebaran Covid-19 yang cepat dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam situasi krisis yang diwarnai dengan ketidakpastian dan ketidakbiasaan memerlukan penyesuaian baru dalam kehidupan normal yang dilakukan masyarakat di bawah kepemimpinan seorang kepala daerah. Sebagai pemegang kekuasaan, kepala daerah diharapkan mampu memberikan respon secara efektif, bukan hanya cepat dalam penanganan sesuai dengan perencanaan sebelumnya tetapi juga gaya kepemimpinan yang penuh perhatian, empati, merasa memiliki, sederhana, dan merakyat guna mencegah reaksi berlebihan dari krisis tersebut.

Kehadiran pemimpin politik tersebut bukan untuk mempertegas kekuasaan laki-laki maskulin yang kompetitif,

otoritas hirarkis, kontrol, dan penyelesaian masalah melalui analisis (Enloe, 2010). Krisis menjadi saat penting bagi pemimpin politik untuk menunjukkan kemampuan dalam membuat perubahan secara positif dalam kehidupan banyak orang. Berpijak pada empat hal yakni kebenaran, ketegasan, cinta dan penguasaan teknologi mengantarkan keberhasilan bagi pemimpin politik dengan gaya kepemimpinannya dalam menekan laju percepatan pandemi beserta dampaknya (Johnson & Williams, 2020). Maka karakter feminin yang mengedepankan kemampuan komunikasi interpersonal, diskusi, kompromi, penuh kehangatan, suka menolong, memperlihatkan empati yang umumnya ditampilkan dengan sosok perempuan diperlukan dalam situasi krisis (Hoyt & Burnette, 2013).

Untuk itulah, bupati Sragen menampilkan gaya kepemimpinan politik feminin yang dipadukan dengan falsafah kepemimpinan Jawa-Surakarta Hasta Brata dan Serat Wedhatama yang diimplementasikan melalui lima M (Melek, Milik, Melok, Muluk, Meluk) yang terlihat pada gaya kepemimpinan Bupati Sragen dalam mengatasi Covid-19:

- 1). Wujud gaya kepemimpinan politik yang Melek (perhatian) yang dilakukan oleh Bupati Sragen

setelah dikeluarkannya keputusan Kejadian Luar Biasa pada bulan April 2020 ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Edaran Penerapan New Normal No. 360/002/038/2020 dan Peraturan Bupati Sragen No. 33 Tahun 2020. Pada Pasal 3 dari peraturan bupati tersebut dinyatakan bahwa Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan baru secara normal kepada masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran Covid-19 sesuai dengan standar protokol kesehatan. Sebagai implementasinya, bupati Sragen pada waktu luang menjadi vaksinator dengan sistem jemput bola. Sistem ini dipilih mengingat tidak semua warga Sragen mau divaksin. Masyarakat Sragen masih ada yang percaya bahwa vaksin bukan untuk menambah daya tahan tubuh terhadap virus Corona. Ketakutan dan kecemasan yang sebagian warga sebagai dampak dari berita bohong media sosial menjadi alasan bagi Bupati Sragen untuk turun langsung memberikan penyuluhan sekaligus memvaksin sendiri khususnya pada yang berusia lanjut, staf kantor kabupaten, warga pedesaan, siswa sekolah bahkan kepala desa yang pernah berdemo menolak vaksin.

- 2). Wujud gaya kepemimpinan politik Muluk (sederhana), ditunjukkan oleh Bupati Sragen melalui partisipasinya secara langsung pada penyaluran bantuan sembako dari pemerintah kepada masyarakat yang terpapar Covid-19. Untuk memperlancar penyaluran 59.087 paket, Bupati Sragen sendiri yang mengupayakan bertemu langsung dengan supplier untuk mendapatkan harga murah, memimpin, mengawal bahkan bertindak sendiri secara langsung pada proses penyaluran bantuan agar benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.

- 3). Wujud gaya kepemimpinan politik Melok (empati), ditunjukkan oleh bupati Sragen melalui komunikasi dengan penduduk yang dilakukannya secara langsung maupun dengan menggunakan media sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Sragen dalam membangun komunikasi dengan menyapa penduduk secara langsung dan mendadak untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan, bupati merangkul dan bekerja sama dengan aparat desa, sukarelawan, bidan desa, organisasi Dharma Wanita Kabupaten,

Bintara Pembina Desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas), dan satgas joko tonggo dari tingkat Kabupaten sampai desa untuk memberikan vaksin dengan jemput bola. Demikian juga dengan program pagar mangkuk untuk membantu warga lain yang terpapar Covid-19. Komunikasi yang dibangun secara tidak langsung yang dilakukan oleh bupati Sragen dengan warganya melalui Whatsapp, Facebook, dan Instagram. Keikutsertaan warga desa menjadi wujud nyata bahwa krisis kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 perlu ditangani secara bersama dan bersinergi antara pemerintah daerah dan warga. Gaya kepemimpinan perhatian Milik (memiliki), ditunjukkan oleh Bupati Sragen keterlibatannya secara langsung pada masyarakat yang ditemukan ada keluarganya yang meninggal akibat Covid-19. Keterlibatan secara langsung tersebut selain berkunjung, memberi hiburan juga memberikan santunan pada anggota keluarga yang lain.

- 4). Untuk mempertahankan perekonomian masyarakat Sragen dan sebagai bentuk gaya kepemimpinan

politiknnya yang Meluk (merakyat) maka warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau yang kehilangan pekerjaan, dipekerjakan sebagai tenaga pengantar kebutuhan masyarakat (melalui sistem pasar online) melalui tiga aplikasi yakni Go Shop, Pasarmu, dan Pasar Online berbasis pasar tradisional. Sehingga penjual di pasar tradisional tetap buka dengan menetapkan protokol kesehatan Bupati Sragen juga memberikan dana pemulihan guna mengurangi pengangguran dan membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Sragen melalui pelatihan warga khususnya perempuan dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan menggandeng koperasi dan supermarket (Indomaret). Melalui strategi tersebut, perempuan yang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaannya mampu menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai ekonomi sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menaati protokol kesehatan melalui pembuatan anyaman tas dan keset yang bertemakan Covid-19 serta masker kelas premium yang dijual ke pasar nasional.

5). Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Sragen selama menjalankan pemerintahan pada masa Covid-19 dapat dikatakan merangkul masyarakatnya, berusaha untuk menempatkan dirinya seperti yang dialami warga Sragen, dan berusaha untuk mengurangi atau bahkan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi warga Sragen melalui program-program yang memberdayakan selama pandemi Covid-19. Gaya kepemimpinan politik Bupati Sragen yang menerapkan kepemimpinan feminin dan lima M menjadi salah satu sarana untuk mengatasi Covid-19 yang ada di wilayah kekuasaannya.

E. Daftar Pustaka

- Ahlquist, J. S., & Levi, M. (2011). Leadership: What it means, what it does, and what we want to know about it. *Annual Review of Political Science*, 14, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042409-152654>
- Aji, D. U. (2020). Kisah Ratu Kalinyamat, Perempuan Tangguh yang Lawan Portugis di Malaka. Detik.Com. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Anabarja, S. (2020). From Big Data to Mask Diplomacy: Taiwan 's Effort to Strengthen International Role Dari Integrasi Mahadata ke Diplomasi Masker: Upaya Taiwan Meningkatkan Peran Internasional A . Safril Mubah Ketika Taiwan melaporkan kasus pertama virus Sars-Cov-2 pada. 189–202.
- As'ad, M., Anggoro, W. J., & Virdianity, M. (2011). Studi Eksplorasi Konstrak Kepemimpinan Model Jawa: Asta Brata. *Psikologi*, 38(2), 228–239.
- Azhar, I. N. (2017). Falsafah Kepemimpinan Bangsa Dalam Paribasan Jawa (Aksioma Budaya Yang Mulai Ditinggalkan). *Journal for Sociological Studies*, 53(9), 21–25. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5074.3125>
- Boogert, J. van den. (2015). Rethinking Javanese Islam. Towards new descriptions of Javanese traditions. In Dissertation submitted to Leiden University. <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/36400>
- Burke, S., & Collins, K. M. (2001). Gender differences in leadership styles and management skills. *Women in Management Review*, 16(5), 244–257. <https://doi.org/10.1108/09649420110395728>

- Childs, S., & Krook, M. L. (2006). Gender and politics: The state of the art. *Politics*, 26(1), 18–28. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2006.00247.x>
- Cornwall, A., & Goetz, A. M. (2005). Democratizing democracy: Feminist perspectives. *Democratization*, 12(5), 783–800. <https://doi.org/10.1080/13510340500322181>
- Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A meta-analysis part of the social psychology commons recommended citation. *Psychological Bulletin*, 108(2), 233–256. https://opencommons.uconn.edu/chip_docs/11
- Enloe, C. (2010). Margins, silences and bottom rungs: how to overcome the underestimation of power in the study of international relations. *International Theory*, 186–202. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511660054.010>.
- Fahriyani, I. D., Megawati, A., Tangketasik, C., & Alfiansyah, Y. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 216–232. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.13037>.
- Faizan, R., Nair, S. L. S., & Haque, A. U. (2018). The effectiveness of feminine and masculine leadership styles in relation to contrasting gender's performances. *Polish Journal of Management Studies*, 17(1), 78–92. <https://doi.org/10.17512/pjms.2018.17.1.07>
- Fibriani, N. (2014). Analisis Gaya Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Perspektif Budaya Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar. *Pemerintahan*, 1–113.

- Hamim, M. (2014). Koralisasi Antara Hasta Brata (Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Budaya Jawa) dan Islamic Leadership (Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam). 15(1), 57–68.
- Han, M., & Sheng, Q. (2020). How does transformational leadership work on COVID-19? An empirical evidence from China Beijing Normal University City University of Macau.
- Hawkesworth, M., & Kogan, M. (1992). Encyclopedia of Government and Politics, Volume I. In M. & M. K. Hawkesworth (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics, Volume I (1st ed.). Routledge.
- Hogan, L. (2021). Moral Leadership: A Challenge and a Celebration. *Theological Studies*, 82(1), 138–155.
<https://doi.org/10.1177/0040563921993456>
- Hoyt, C. L., & Burnette, J. L. (2013). Gender Bias in Leader Evaluations: Merging Implicit Theories and Role Congruity Perspectives. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 39(10), 1306–1319.
<https://doi.org/10.1177/0146167213493643>
- Indriani, I., Qotimah, I. K., & Musyafa, N. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. 20(November), 129–144.
<https://doi.org/10.21580/dms.2020.202.6162>
- Johnson, C., & Williams, B. (2020). Gender and Political Leadership in a Time of COVID. *Politics and Gender*, 16(4), 943–950.
<https://doi.org/10.1017/S1743923X2000029X>

- Kark, R. (2004). The transformational leader: Who is (s)he? A feminist perspective. In *Journal of Organizational Change Management* (Vol. 17, Issue 2, pp. 160–176). <https://doi.org/10.1108/09534810410530593>.
- Kurniawan, A. F. (2019). Falsafah Kepemimpinan Pendidikan (Hasta Brata sebagai Basis Kepemimpinan Pendidikan. *RI'AYAH*, 04(02).
- Luoto, S., & Varella, M. A. C. (2021). Pandemic Leadership: Sex Differences and Their Evolutionary–Developmental Origins. *Frontiers in Psychology*, 12(March). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633862>
- Munandar, A. A. (2015). Kedudukan dan Peran Perempuan pada Masa Jawa Kuno: Era Majapahit. *Jumantara*, 6(1), 1–18.
- Munna, U. L., & Ayundasari, L. (2021). Islam Kejawaen : Lahirnya akulturasi Islam dengan budaya Jawa di Yogyakarta. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 317–325. <https://doi.org/10.17977/um063v1i3p317-325>
- Nastiti, T. S. (2009). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad VIII-XV Masehi). Universitas Indonesia.
- Nawaz, A., & Khan, I. U. (2016). Leadership Theories and Styles : A Literature Review. 16(January), 1–7.
- Ningsih, W. L. (2021, May 20). Kerajaan Kalingga: Raja-Raja, Kehidupan Politik dan Peninggalan. 6.
- Nurrohman, B., & Ramadhan, G. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Masa Krisis: Studi Kasus Bupati Serang

dalam Penanganan Covid-19. *Ijd-Demos*, 2(3), 271–282.
<https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.67>.

- Purba, J. R. (2015). *Kepemimpinan Sang Walikota* :
- Rasyid, A. (2013). Analisis kepemimpinan bupati periode 2014-2019 di kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 33–48.
- Sanjaya, R. (2015). Seminar Nasional Peluang Indonesia Dalam Persaingan Ekonomi Kreatif Global. *Kepemimpinan Transformasional Yang Paling Baik? (Sebuah Kajian Pustaka)*, 1–16.
- Siswanto, D. (2016). Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial). *Jurnal Filsafat*, 20(3), 197–216.
<https://doi.org/10.22146/jf.3419>
- Subadi, T. (2004). *Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen*.
- Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2020). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Penanggulangan Covid- 19 : Bupati Serang*. 1(1), 117–126.
- Sunarni. (2016). Menguak Kembali Falsafah Kepemimpinan. *Administrasi Pendidikan*, 1(1), 558–570.
- Sung, C. C. M. (2012). Exploring the interplay of gender, discourse, and (im)politeness. *Journal of Gender Studies*, 21(3), 285–300.
<https://doi.org/10.1080/09589236.2012.681179>
- Susetya, W. (2016). Meneladani Kepemimpinan Kanjeng Panembahan Senapati. In *Pemimpin Masa Kini & Budaya Jawa*. PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.

- Tang, M. (2017). Feminist Theory. In R. W. & C. S. McGlinchey Stephen (Ed.), *International Relations Theory* (1st ed., pp. 1–11). E-International Relations Publishing.
- Wahyuni, E., & Hertati, D. (2021). Impelementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Journal Publicuho*, 4(2), 1–15.
<https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18077>
- Widodo, S. T. (2016). The Concept of a Social Organism: The response of Javanese Society to Modernism in the *Serat Wedhatama* by Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Mangkunegara IV. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(1), 519–526.
- Yogiswari, K. S. (2020). *Kejawen: Kearifan yang Adiktif*. Genta Hredaya, 4(2), 101–111.
- Zahra, E. F. (2020). Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang – Bayang Patriarki. 2(1), 68–77.

Profil Penulis

Setyasih Harini, SPP, MSi

Dosen Universitas Slamet Riyadi Surakarta (Unisri)

Email: setya_rini@unisri.ac.id



Dosen Program Studi Hubungan Internasional yang lebih akrab dipanggil dengan Rini merupakan sosok emak milenial yang produktif. Mata kuliah yang selama ini dipercayakan diantaranya adalah Gender dan Politik serta Metodologi Penelitian Sosial.

Selain mengajar, amanah yang diberikan oleh universitas adalah sebagai Ketua Pusat Studi Wanita. Perjuangan panjang untuk menjadi dosen dilalui dari jenjang S-1 UPN Veteran Yogyakarta, S-2 Universitas Gadjah Mada dan saat ini sedang menempuh studi S-3 di Universitas Padjajaran. Kegiatan tulis menulis dihiasi dengan menjadi penulis terbaik nasional dalam lomba penulisan artikel

pemberantasan buta aksara dan keaksaraan fungsional dengan memilih obyek di bantaran Sungai Bengawan Solo dan Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Penghargaan sebagai salah satu penulis terbaik nasional diberikan secara langsung oleh Menteri Pendidikan pada tahun 2006, 2008 dan 2009 dan dari PT. PLN Indonesia pada tahun 2006 dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Penghargaan Kurikulum dan Perbukuan Dalam Penulisan Naskah Buku Pengayaan, dan Penulisan Otonomi Daerah pada tahun 2013. Karya tulis buku diantaranya Pemberantasan Buta Aksara (2008), buku sastra Jawa Kethek Ogleng (2009), Perjuangan Jenderal Soedirman (2010), Lebih Dekat dengan Benua Kanguru (2017), Media dan Dinamika Sosial Politik Indonesia (2018), buku sastra Romo YB. Mangunwijaya (2018), book chapter Gender dan Hubungan Internasional Indonesia-Australia (2019), Modul dengan judul Memberdayakan Budaya Literasi Berbasis Digital (2019), Pendidikan Karakter Melalui Seni Tari Daerah (2021), Dinamika Masyarakat Di Masa Pandemi (2021). Sampai sekarang, saya masih aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendampingi para guru dalam penulisan artikel ilmiah.